

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andrew Ashworth. 2002. *Human Rights, Serious Crime and Criminal Procedure*. London: Sweet & Maxwell.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Atmasasmita, Romli. 2012. *Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Atmasasmita, Romli. 2018. *Reformasi Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Barry A., Michael. 1996. *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*. Surabaya: Indah Surabaya.
- Barda Nawawi, Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Eddy O.S. Hiariej. 2017. *Hukum Acara Pidana*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Ermansjah, Hartanti. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fadli Muhammad, Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hamdan, Kuffal. 2010. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E.Y. Kanter. 2022. *Asas dan Norma Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). 2020. *Lembaga Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: ICW.

- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi Korupsi*. Jakarta: KPK.
- Leden, Marpaung. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Djambatan.
- Leden, Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lasmadi, Soetarmadi. 2018. *Bahan Untuk Sidang Praperadilan*.
- Lilik Mulyadi. 2016. *Hukum Praperadilan: Teori dan Praktik dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Hayat. 2015. *Inilah Jawaban Kontroversial Jaksa di Sidang Perdana Praperadilan Dahlan Iskan*.
- Muntaha. 2006. *Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*.
- Muqoddas, Busyro. 2013. *Membumikan Etika Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas.
- Muladi. 2013. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Nawawi Barda, Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Oce, Madril. 2015. *Putusan Sesat Praperadilan*. Pusat Kajian Anti Korupsi.
- Salam.(2021). *Pra Peradilan Dalam Sistem Hukum*. 8 Nomor 5.
- Soerjono, Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sri Tiyas, Wilda Rizki. 2009. *Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta.
- Sudarto, Tanusubroto. 1983. *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sunarto, Usman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

- Syamsuddin Otto, Adji. 1980. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Elangga.
- Wahid, Abdul. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiyono Sarwono, dkk. 2014. *Pra Peradilan Di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Yahya M., Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahya M., Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahya M., Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahya Harahap, M. 2015. *Praperadilan dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yusron Mochamad, Setiawan. 2024. *Praperadilan Kasus Korupsi SP3 dalam Perspektif Peradilan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika.

TESIS

- Azzahra Aliqa Putri. AKIBAT HUKUM PUTUSAN PRA PERADILAN TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA DUGAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Pada Nomor Perkara 6/Pid.Pra/2021/PN Tjk) tahun 2023.
- Edo Aldo. Pengesampingan Perkara Sebagai Implementasi Asas Oportunitas Yang Dimiliki Oleh Jaksa Agung Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2023.
- Tabah Santoso, Kewenangan Hakim Praperadilan Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Kekuasaan Kehakiman. 2019.

ARTIKEL JURNAL / KARYA ILMIAH LAINNYA

- Erdianto, Kristian. 2023. "Praperadilan dalam Perkara Korupsi: Tantangan dan Solusinya." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3): 413.
- R., S. 2018. Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Progesif*, 89-100.
- Santoso, Topo. 2016. "Praperadilan dan Penyalahgunaan Wewenang." *Jurnal Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung*, 5(1): 35–40.
- Simanjuntak, M. 2023. "Polemik Praperadilan dan Gugatan Status Tersangka." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2): 201.
- S., S. 2019. Problematika Praperadilan di Indonesia: Analisis Putusan Hakim. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 145-160.

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Hendra Yuristiawan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 27 Maret 2025.

INTERNET

- <https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-praperadilan-di-indonesia-lt5b064a4bcfc39>
- <https://media.neliti.com/media/publications/279196-praperadilan-sebagai-upaya-hukum-bagi-te-1b7f7670.pdf>
- <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt65c74fee4118a/praperadilan-vs-tipikor-dan-berbagai-putusan-yang-dikabulkan/>
- <https://news.detik.com/berita/d-7635888/pertimbangan-lengkap-hakim-gugurkan-status-tersangka-paman-birin-di-kpk>
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/la-nyalla-menang-di-praperadilan-kejati-jatim-tak-tinggal-diam-lt570cfcdbbeec/>
- <http://digilib.unila.ac.id/76445/1/1.%20ABSTRAK.pdf>
- <https://core.ac.uk/download/pdf/327217415.pdf>
- <https://repository.unja.ac.id/57803/4/ABSTRAK%20%28EDO%20ALDO%209.pdf>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP)

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang –
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (PTPK).